

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah masa silam Kabupaten Bandung selalu menarik untuk digali dan dikaji. Beberapa pakar sejarah menempatkan wilayah ini sebagai kawasan yang selalu memunculkan hal-hal baru dan tidak terduga dalam perspektif sejarah masa lampau. Tidak terkecuali dalam sejarah perjalanan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Bandung. Banyak hal yang dapat digali dan dikaji sebagai cerminan nilai-nilai luhur masa lampau yang positif untuk dijadikan pedoman pada masa sekarang. Sebuah perjalanan sejarah kepemimpinan yang sangat panjang telah dilalui pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kepemimpinan Bupati Bandung merupakan kepemimpinan yang unik dengan warna tradisional yang kental dan melekat secara khas.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada pola kepemimpinan yang berubah yang mana bupati dijadikan sebagai pegawai resmi pemerintahan kolonial, bupati berada dalam dua posisi. *Pertama*, posisi bupati sebagai aparat kolonial terhadap pejabat kolonial khususnya terhadap residen sebagai atasan langsung. *Kedua*, posisi bupati sebagai kepala daerah terhadap pejabat bawahannya dan rakyat. Hubungan utama antara bupati dengan pejabat kolonial adalah hubungan antara bawahan dengan atasan. Sedangkan hubungan bupati dengan bawahannya dan rakyat secara umum terjalin oleh ikatan (budaya) feodal-tradisional yang telah melembaga karena bupati merupakan pemimpin tradisional. Oleh karena itu kepemimpinan bupati adalah kepemimpinan yang tradisional karismatis, karena berakar pada struktur sosial yang tersusun berdasarkan keturunan, kekayaan dan status sosial. Sejak awal pemerintahan Hindia Belanda yang diperintah oleh Daendels, ia mengurangi kekuasaan dan hak bupati, termasuk hak mewariskan jabatan, karena Daendels tidak mengakui prinsip pergantian bupati secara turun menurun. Pergantian bupati berdasarkan penunjukkan oleh pemerintah kolonial. Hal ini dilakukan karena ia ingin melaksanakan sistem pemerintahan langsung yaitu memerintah rakyat secara langsung tanpa melalui bupati (Yulifar, 2014, hlm. 22-26).

Sampai akhir masa pemerintahannya, upaya Daendels ini mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh kuatnya kedudukan atau posisi bupati dalam kehidupan di daerah Kabupaten. Namun upayanya

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

tersebut diteruskan oleh para gubernur jenderal penggantinya (Yulifar, 2014, hlm. 28). Sistem pemerintahan langsung tersebut terlihat juga di pemerintahan daerah Bandung yang mana pada tahun 1893-1918 yang dipilih menjadi Bupati Bandung adalah R.A.A. Martanagara yang bukan berasal dari keturunan menak Bandung, bupati ini pun merupakan bupati “*panyelang*”. Adanya pergantian jabatan oleh menak dari lain tempat, ternyata menimbulkan konflik dari kalangan menak Bandung karena sebelumnya menak Bandung juga mengajukan usul beberapa calon bupati, namun usul mereka tidak mendapat persetujuan Pemerintah Hindia Belanda (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 47).

R.A.A. Martanagara kemudian digantikan oleh R.A.A. Wiranatakusumah V yang menjabat tahun 1918-1931/ 1935-1945, ia merupakan menak Bandung anak dari Dalem Kusumadilaga (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 53). Hal ini menunjukkan pemerintah kolonial tidak berhasil menghapus sistem pewarisan jabatan bupati, tetapi pergantian bupati masih tetap bersifat turun temurun. Pemerintah kolonial sulit untuk menghapus sistem itu, karena sistem pewarisan jabatan bupati sudah menjadi tradisi yang melembaga sehingga orang Belanda tidak mungkin menduduki jabatan bupati (Yulifar, 2014, hlm. 35). Faktor utama penyebabnya adalah kuatnya peran bupati sebagai kepala daerah yang ditunjang oleh kedudukannya sebagai pemimpin tradisional, dengan kekuasaan *legal-rasional* dan *kharismatis*. Dengan demikian kedudukan bupati tidak bisa dipegang oleh orang asing. Oleh karena itu, bupati tetap berperan sebagai kepala daerah (Yulifar, 2014, hlm. 234-235).

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, Bupati Bandung tetap dijabat oleh R.A.A. Wiranatakusumah V. Kekuasaan bupati menurut garis tradisional masih tetap dihormati atau tidak diganggu-gugat oleh pemerintah militer Jepang. selain ia sebagai bupati pada awal Agustus 1942, ia diangkat menjadi wakil *Syuutyoo* Priangan, untuk menjalankan pemerintahan di Bandung *ken* (Kabupaten) sehari-hari, maka pada bulan April 1942 diangkatlah R.E. Soeriapoetra sebagai wakil Bupati Bandung. Situasi tersebut hanya berlangsung selama kira-kira 9 bulan karena Priangan *Syuutyoo-Ken* kemudian diganti oleh seorang Jepang yang ahli dalam bidang pemerintahan, sehingga wakil *Syuutyoo* dan wakil Bupati Bandung dihapuskan, oleh karena itu R.E. Soeriapoetra dipindahkan menjadi Bupati Garut (Yahya, 2011, hlm. 4).

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Pada akhir masa pendudukan Jepang Bupati R.A.A. Wiranatakusumah V diangkat untuk menjabat *Naimmbu Senyo* di Jakarta. Dengan demikian, jabatan Bupati Bandung menjadi kosong. Untuk mengisi kekosongan itu, pada tanggal 5 Juni 1945 pemerintah militer Jepang mengangkat R.E. Soeriapoetra yang sedang menjabat Bupati Garut menjadi Bupati Bandung. Ia seorang yang tidak asing lagi bagi Kabupaten Bandung karena sebelumnya telah lama menjadi pejabat di daerah Bandung. Sampai berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia jabatan Bupati Bandung tetap dipegang oleh Bupati R.E. Soeriapoetra (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 86). Hal menarik untuk dikaji di sini adalah meskipun R.E. Soeriapoetra ini sudah menjabat sebagai Bupati Garut, akan tetapi ia oleh Jepang diangkat sebagai Bupati Bandung. Hal tersebut perlu dikaji alasan mengapa R.E. Soeriapoetra yang dipilih oleh pemerintah Jepang sebagai Bupati Bandung. Padahal sebelumnya pemerintah Jepang menghormati kekuasaan bupati menurut garis tradisional, mengingat R.E. Soeriapoetra sendiri bukan keturunan menak Bandung.

Setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka berakhirilah masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dan Indonesia memasuki babak baru sebagai negara merdeka (Lubis, 2003, hlm. 203). Segera setelah itu, bersama dengan pesan pribadi Hatta kepada sahabat-sahabatnya dari kelompok nasionalis, proklamasi kemerdekaan disiarkan di seluruh radio Domei Indonesia dan Jaringan telegraf oleh para pegawai Indonesia di Jakarta (Kahin, 2013, hlm. 198). Dalam hal ini Ekadjati, Hardjasaputra, & Marlina (1985), mengemukakan bahwa:

Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat cepat menyebar keseluruh pelosok kepulauan Indonesia, karena sedikitnya alat komunikasi yang dapat digunakan. Namun tidak demikian dengan Bandung berita itu sampai pada hari itu juga. Melalui sistem telekomunikasi kantor berita Domei, teks proklamasi itu sampai di Bandung dan diterima oleh A.Z. Palindih, Muhamad Adam, Danila, dan Matullessy. Kemudian teks proklamasi tersebut ditempelkan pada papan tulis yang ada di depan Kantor Domei (hlm. 26).

Berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera disambut gembira oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh masyarakat Kota Bandung (Suwirta, 2015, hlm. 161). Setelah kemerdekaan

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kelengkapan negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang di bekas gedung *Raad van Indie*. Dalam sidang itu ditetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas usulan dari Oto Iskandar di Nata.

Keesokan harinya tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah berhasil menyusun 12 kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A. Wiranatakusumah, pada tanggal itu pula PPKI berhasil membentuk delapan provinsi yang dikepalai oleh gubernur dan masing-masing provinsi terdiri atas keresidenan-keresidenan yang dikepalai oleh residen. Masing-masing keresidenan tersebut terdiri atas kabupaten dan kotapraja. Kemudian para bupati diangkat baik oleh pemerintah pusat maupun oleh KNID setempat. Jabatan bupati, wedana dan camat tetap dipegang oleh pejabat lama, yaitu salah satunya Bupati Bandung yang dijabat oleh R.E. Soeriapoetra (Lubis, dkk, 2011, hlm. 245).

Dari pernyataan di atas terdapat masalah yang perlu dikaji mengapa pemerintah daerah Kabupaten Bandung, setelah Indonesia merdeka tetap memilih R.E. Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut mengapa hal itu terjadi, karena apabila dilihat dari pola kepemimpinan Bupati Bandung sebelumnya dipilih berdasarkan garis keturunan sedangkan R.E. Soeriapoetra bukan keturunan Bupati Bandung melainkan Bupati Sumedang. Apakah saat ia terpilih sebagai Bupati Bandung, ada perlawanan dikalangan menak Bandung yang menentang pemilihan bupati di luar garis keturunan Bupati Bandung, seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada saat Martanagara menjabat sebagai Bupati yang mana ada konflik di antara menak Bandung. Akan tetapi pada kenyataannya saat R.E. Soeriapoetra diangkat sebagai Bupati Bandung tidak menimbulkan perlawanan, padahal ia pun sama keturunan dari Bupati Sumedang dan bukan keturunan langsung dari Bupati Bandung, mengapa hal ini bisa terjadi pada saat pengangkatan R.E. Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung. Maka dari itu peneliti merasa ada sesuatu yang menarik untuk dikaji (Mulyana, dkk, 2014, hlm. 45).

Raden Tumenggung Endung Suriaputra, lahir di Soreang pada tanggal 14 September 1894 (Irwana, 2011, hlm. 21). Senada dengan

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

yang dijelaskan oleh Sari, dkk (2011, hlm. 110), bahwa nama lengkap dari Bupati Bandung periode 1945-1947 adalah Raden Tumenggung Endung Suriaputra. Akan tetapi ini bertolak belakang dengan yang dijelaskan oleh Sungkawa (2013b, hlm. 54) bahwa “nama lengkap dari Bupati Bandung periode 1945-1947 adalah R.T.E. Suriasaputa yang lahir di Soreang pada tanggal 9 September 1894”. Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung (2011, hlm. 87) menjelaskan nama lengkap dari Bupati Bandung adalah R.K. Suriasaputa, dilahirkan di Soreang pada tanggal 9 September 1894. Hal yang sama pun dikemukakan oleh Adeng, dkk, (2012, hlm. 79) dijelaskan bahwa Bupati Bandung bernama Suriaputra. Akan tetapi ini bertolak belakang dengan yang dituliskan dalam Soerat Asal Oesoel dari Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra yang mana dijelaskan bahwa Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra dilahirkan di Kabupaten Sumedang tanggal 17 September 1894.

Hal menarik yang perlu dikaji, berdasarkan pernyataan di atas yaitu pertama nama dari Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra dari beberapa sumber dituliskan dengan nama yang berbeda, ada yang menuliskan “Suriasaputra” dan ada yang menuliskan “Suriaputra”, selain itu juga tanggal lahirnya ada yang menuliskan tanggal “14 September”, ada yang menuliskan tanggal “9 September”, dan ada yang menuliskan tanggal “17 September”. Serta tempat tanggal lahir ia pun berbeda ada yang menyebutkan di “Soreang” dan ada yang menyebutkan di “Sumedang”. Di sini peneliti perlu menelusuri kebenaran mulai dari nama dan tanggal serta tempat lahir dari Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra. Menurut peneliti ia merupakan tokoh yang penting khususnya di Kabupaten Bandung, tentunya sudah seharusnya nama dan tempat tanggal lahirnya ditulis dengan benar, sehingga masyarakat nantinya tidak salah dalam menyebutkan namanya yang merupakan Bupati Bandung periode 1945-1947. Oleh karena itu perlu dikaji dan ditelusuri lebih lanjut mengenai latar belakang kehidupan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra.

Pada saat R.T.E. Soeriapoetra menjadi Bupati Bandung periode 1945-1947 terjadi berbagai pergolakan politik, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka namun perjuangan tersebut belum berakhir, bangsa Indonesia masih perlu berjuang dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang telah Indonesia capai bukanlah hasil akhir dari perjuangan, akan tetapi awal perjuangan baru dalam membangun tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk mempertahankan

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kemerdekaan dan mengupayakan kedaulatan dilakukan perjuangan fisik dan non fisik (Prihartanti, 2010, hlm.1). Memasuki bulan September 1945, Indonesia mengalami situasi krisis di mana masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian, rasa cemas, ketakutan, dan desas-desus akan bahaya musuh yang datang mengancam, baik dari dalam maupun luar (Reid, 1974, hlm. 54). Situasi kemelut politik inilah yang terjadi di Bandung, ketika pemerintahan Bandung harus mempertahankan kemerdekaan dari Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia (Smail, 2011, hlm. 78).

Pada tanggal 12 Oktober 1945 Brigade MacDonald dari Divisi India ke-23 tiba di Kota Bandung dengan menumpang kereta api. Mereka datang ke Bandung dalam rangka pendudukan Sekutu di Indonesia. Dalam Pasukan Sekutu itu turut membonceng tentara NICA. Bandung adalah Kota kedua di Jawa Barat yang didatangi Tentara Sekutu setelah Jakarta (Tim Pansus DPRD Jawa Barat, 1995, hlm. 125). Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945 dilakukan pertemuan antara pihak Sekutu dengan TKR, namun hasil dari pertemuan tersebut dalam perkembangannya, ternyata pihak Sekutu lebih berpihak kepada Belanda. Sehingga terjadilah bentrokan senjata di berbagai tempat (Ekadjadi, dkk, 1980, hlm. 99).

Situasi sosial dan politik sangat memanas, pertempuran demi pertempuran menghebat di mana-mana (Sutardi, 2011, hlm. 214). Terjadi peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946, kemudian peristiwa Heroik Dayeuh Kolot pada tanggal 11 Juli 1946 yang berhasil menghancurkan gudang mesiu dan persenjataan sebagai pusat pertahanan tentara NICA (Poeponegoro & Notosusanto, 2008, hlm. 201). Akibat serangan dan ultimatum dari Sekutu dan Belanda, pemerintah Kabupaten Bandung sempat mengalami beberapa kali pindah. Semula ke Sentosa Pangalengan, kemudian ke Cikopo, hingga terakhir ke Bungbulang (Abdurachman, 2000, hlm. 114).

Pada saat wilayah Bungbulang diserang oleh Belanda, kondisi keamanan pun bertambah buruk sehingga Bupati Bandung pindah lagi ke Lebakseuti. Para Pegawai kabupaten tetap berada di Nangkaruka. Tempat Bupati Bandung di Lebakseuti sangat dirahasiakan. Ia disembunyikan di suatu tempat oleh kokolot Lebakseuti bernama Maja, namun persembunyian itu tercium juga ketika Maja tertangkap dan dimintai keterangan soal keberadaan Bupati Bandung. Akhirnya Bupati Bandung tertangkap dan ditahan di Malabar Bandung. Pada saat di tahanan ia ditawarkan oleh Belanda untuk menjadi bupati kembali di

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

bawah Negara Pasundan namun ia menolaknya, ia lebih memilih ditahan dibandingkan harus bekerjasama dengan Belanda (Sungkawa, 2013b, hlm. 54-57).

Hal menarik yang perlu dikaji berdasarkan pernyataan di atas yaitu, bagaimana R.T.E. Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung dalam menjalankan roda pemerintahannya di tengah situasi politik yang kian memanas, dan bagaimana ia dalam menjalankan perannya sebagai bupati. Di mana dalam proses pemerintahannya harus berpindah-pindah karena terus diserang oleh pihak Belanda. Sehingga dari permasalahan tersebut menimbulkan rasa ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran R.T.E. Soeriapoetra pada masa revolusi 1945-1949.

Berikutnya, yang menarik adalah rasa nasionalismenya yang mana ia lebih memilih untuk ditangkap ketimbang harus bekerjasama dengan Belanda. Akan tetapi dalam prosesnya menimbulkan pertanyaan bagi peneliti yaitu mengapa jika ia menolak dan memilih untuk ditahan, tapi pada akhirnya ia ikut terlibat dalam *Recomba* dan juga Negara Pasundan yang awalnya ia menolak keras untuk bergabung. Hal tersebut menjadi keresahan peneliti untuk menelusuri lebih mendalam mengenai alasan dari R.T.E. Soeriapoetra untuk terlibat dalam *Recomba* dan juga Negara Pasundan. Apakah ia seorang nasionalis, ataukah seorang yang pada akhirnya pro Belanda ini pun perlu ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, alasan peneliti mengkaji tentang R.T.E. Soeriapoetra, karena belum banyak yang mengetahui tentangnya. Padahal ia merupakan tokoh lokal khususnya di daerah Bandung yang memiliki peran yang cukup penting. Sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 211).

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul: *Peranan Raden Toemengoeng Endoeng Soeriapoetra pada Masa Revolusi (1945-1949)*. Peneliti memilih periode 1945-1949 sebagai kajian peneliti, sesuai dengan kiprahnya di Bandung pada masa revolusi. Mulai dari jabatannya sebagai Bupati Bandung periode 1945-1947, hingga jabatannya setelah tidak menjabat sebagai Bupati Bandung tahun 1947-1949.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, terdapat satu permasalahan yang perlu dikaji yaitu “Bagaimana Peran Raden Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra pada Masa Revolusi (1945-1949)?". Dari rumusan masalah tersebut peneliti akan membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra?
2. Bagaimana proses pengangkatan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung?
3. Bagaimana kiprah Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra pada masa revolusi di Bandung tahun 1945-1949?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui peranan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra pada Masa Revolusi 1945-1949. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini di antaranya untuk :

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra
2. Menganalisis proses pengangkatan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung
3. Menganalisis kiprah Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra pada masa revolusi di Bandung tahun 1945-1949

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah khasanah penulisan sejarah lokal di Kabupaten Bandung, mengenai sejarah pasca kemerdekaan dan Revolusi di Kabupaten Bandung
2. Pendokumentasian biografi tokoh lokal di Kabupaten Bandung

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi, rencana penulisan skripsi ini disesuaikan dengan buku Pedoman Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2017, sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai gagasan pokok yang berhubungan dengan latar belakang penelitian yang di

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

dalamnya terdapat masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Masalah yang diangkat tersebut harus memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengarahkan dan mengkaji pembahasan dalam skripsi. Pada bab ini juga memaparkan tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang dapat mendukung penelitian. Konsep-konsep tersebut harus dihubungkan dan dianalisis dengan masalah yang sedang dikaji serta disimpulkan dengan menggunakan bahasa sendiri. selain itu, dalam bab ini memaparkan mengenai sumber literatur dan penelitian terdahulu yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan mengenai kegiatan-kegiatan dan cara-cara yang ditempuh peneliti dalam rangka penelitian skripsi. Metode yang digunakan tentu adalah metode penelitian sejarah, di mana langkah-langkahnya terbagi menjadi Heuristik (Pengumpulan Sumber), kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan, interpretasi sumber, hingga ke tahap penulisan atau historiografi. Dari setiap langkah yang ditempuh nantinya akan dipaparkan lebih rinci lagi sesuai dengan keadaan yang dialami peneliti di lapangan. Metode umum yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian adalah metode historis, sedangkan metode khusus yang digunakan oleh peneliti adalah analisis biografi tokoh.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang kehidupan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra, pengangkatan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung, dan Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra di Bandung pada masa revolusi tahun 1945-1949.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya. Selain itu dikemukakan juga pula rekomendasi dari hasil penelitian.

Kharista Setyo Nur Utami, 2018

PERANAN RADEN TOEMENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA PADA MASA REVOLUSI (1945-1949)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu